

Dewan HAM PBB Desak Prancis Ubah RUU Keamanan Baru

JENEWA(IM) - Dewan HAM PBB turut mendesak Prancis untuk menarik sebuah artikel dari rancangan undang-undang (RUU) keamanan baru mereka, yang berupaya melarang distribusi video dan foto yang mengidentifikasi petugas penegak hukum. Undang-undang keamanan tersebut telah memantik kontroversi di dalam negeri Prancis.

“Undang-undang itu harus dibicarakan oleh rakyat Prancis. Tapi, itu adalah Pasal 24, yang benar-benar kami khawatirkan, dan itulah mengapa kami menyebutkan bahwa harus ditinjau ulang dan, saya kira, harus ditarik,” kata kepala Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet.

Dia mendesak Prancis dan banyak negara lain untuk secara serius memeriksa praktik penegakan hukumnya, serta praktik diskriminatif sistemik dan bias terhadap kelompok ras tertentu.

“Dan tentu saja, kami mendesak otoritas Prancis untuk menghindari tindakan yang mengakibatkan stigmatisasi seluruh kelompok,” sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis

(10/12). Bachelet juga menyerukan langkah aktif untuk memastikan kelompok tidak distigmatisasi atau hak asasi mereka dilanggar karena individu tertentu.

Pasal 24 dari RUU tersebut yang diusulkan dimasukkan atas desakan serikat polisi. Undang-undang ini menyatakan untuk “melindungi mereka yang melindungi kita” dan akan melarang publikasi gambar polisi atau pasukan penegak hukum lainnya di ketika sedang bertugas.

RUU tersebut melarang petugas polisi diidentifikasi dengan jelas untuk apa yang disebut “tujuan jahat”. Hukuman penjara satu tahun dan denda sebesar USD sebagai hukuman karena menyebarkan gambar petugas polisi, yang berpotensi menyebabkan cedera fisik dan psikologis kepada petugas.

Pengajuan RUU tersebut menuai protes di seluruh Prancis. Para pengunjung rasa juga marah tentang video yang menunjukkan polisi dengan kasar membubarkan kamp migran di Paris dan aksi pemukulan terhadap seorang produser musik kulit hitam. ● gul



PANDEMI COVID-19 AUSTRALIA

Kepala Departemen Kesehatan Australia Dr. Brendan Murphy, Menteri Kesehatan Greg Hunt dan Perdana Menteri Scott Morrison memberikan keterangan media di Gedung Parlemen di Canberra, Australia, Jumat (11/12).

Pelanggaran HAM atas Pengikut Gulen di Turki Jadi Sorotan Internasional

Puluhan ribu warga sipil Turki ditahan sejak upaya kudeta yang gagal terhadap Erdogan pada 2016.

STOCKHOLM(IM)- Institut Pers Internasional (IPI) dalam peringatan hari hak asasi manusia (HAM) internasional menyoroti masalah pelanggaran HAM terhadap para pengikut ulama Fethullah Gulen dan kebebasan pers di Turki yang terjadi di masa rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan. Mereka mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan upayanya menekan Turki agar menghormati supremasi hukum dan HAM.

Laporan tersebut mengkaji ancaman sensor ekstensif terhadap Internet yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Media Sosial, yang mulai berlaku pada 1 Oktober lalu. Juga penangkapan bermasalah politik atas badan pengelola media dan bagaimana hal itu digunakan untuk memberangus kritik publik dan jurnalisisme kritis; dan krisis independensi peradilan yang sedang berlangsung. Laporan yang disampaikan IPI hasil dari misi bersama ke Turki pada 6 hingga 9 Oktober 2020. Mereka menerima laporan dari 11 organisasi kebebasan berekspresi, jurnalis, dan organisasi HAM internasional.

Anggota misi bertemu dengan para profesional media, tokoh masyarakat sipil, otoritas peradilan dan regulator, anggota parlemen dan perwakilan misi diplomatik untuk meninjau status kebebasan media di negara tersebut.

Menurut laporan tersebut,

penangkapan jurnalis terus menjadi perhatian besar. Sejak awal tahun 2020, setidaknya 22 jurnalis telah ditangkap, beberapa di antaranya telah dibebaskan sementara penyelidikan terus berlanjut.

Hingga November 2020, setidaknya telah digelar 130 audiensi yang melibatkan jurnalis sebagai terdakwa tahun ini. Mengutip laporan pers bulanan Gazette Kanca, setidaknya 30 investigasi atau tuntutan hukum baru dibuka terhadap jurnalis dalam delapan bulan pertama tahun 2020.

Masih menurut laporan pers tersebut, ratusan jurnalis lainnya terus menghadapi tuntutan dan larangan perjalanan di hadapan pengadilan yang ditujukan untuk membungkam hak jurnalis untuk mendapatkan peradilan yang jujur.

Jumlah jurnalis yang dipenjarakan dan dituntut menurun sebagai akibat dari penyelesaian kasus yang dilakukan setelah kudeta yang gagal pada Juli 2016. Penurunan ini juga dikaitkan dengan keberhasilan pemerintah Turki dalam memberangus media.

Namun, jurnalis dari seluruh spektrum media terus menghadapi ancaman penangkapan dan penuntutan atas liputan mereka tentang masalah-masalah yang sensitif terhadap pemerintah, seperti operasi militer, kemerosotan ekonomi, dan masalah yang dihadapi Kurdi dan kelom-

pok minoritas lainnya di Turki. Cakupan pandemi Covid-19 juga ditambahkan ke daftar tahun ini karena IPI mencatat 13 insiden antara Maret hingga Agustus di mana jurnalis ditahan, disidiki, atau menghadapi pelanggaran sistematis atas hak-hak mereka saat melaporkan kasus Covid 19.

Laporan IPI menambahkan, meski pengadilan tetap kritis, 79 jurnalis saat ini mendekam di dalam penjara, di mana pada tahun sebelumnya perjuangan kebebasan berekspresi bergeser dari ruang sidang ke ranah regulator. Pemerintah Turki dinilai semakin membatasi kebebasan berekspresi di negara itu melalui regulator yang telah meningkatkan sanksi mereka untuk media cetak dan berbagai lembaga penyiaran.

Delegasi IPI menyerukan diakhirinya penyalahgunaan badan pengatur negara, termasuk Dewan Tinggi Radio dan Televisi (RTUK) dan Otoritas Periklanan Pers (BIK), untuk menghukum dan melumpuhkan media independen secara finansial. Laporan tersebut juga menggarisbawahi bahwa RTUK telah meningkatkan kampanye denda dan larangan siaran di stasiun televisi independen.

Disebutkan, Undang-Undang Media Sosial, yang mulai berlaku pada 1 Oktober, menimbulkan ancaman langsung dari sensor ekstensif di Internet. Hal ini sangat mengkhawatirkan—menyusul pengambilalihan oleh negara atas media arus utama—untuk platform media sosial serta situs berita online, di antara benteng terakhir jurnalisisme kritis di Turki.

Laporan tersebut dilakukan

oleh IPI dengan dukungan dari Association of European Journalists (AEJ), Committee to Protect Journalists (CPJ), European Center for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ), Observatorio Balcánico Caucaso Transseuropa (OBCT), PEN International, Reporters without Borders (RSF) dan South East Europe Media Organization (SEEMO).

ementera itu, Advocates of Silenced Turkey (AST) pada peringatan hari HAM internasional pada 10 Desember 2020, didukung menjadi penyelenggara Konvensi Kebebasan 2020 pada 9-10 Desember untuk menanggapi semua pelanggaran HAM di Turki terkait sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seperti yang tercantum dalam dokumen HAM.

AST telah meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran HAM di Turki dan mengadvokasi hak-hak orang yang teraniaya. Mereka menyoroti langkah represif Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan pembersihan besar-besaran kepada para pengikut ulama Turki Fethullah Gulen. Lebih dari 150.000 pekerja publik, termasuk jenderal, laksamana, hakim, jaksa penuntut, dokter, guru, petugas polisi, dan lain-lain, telah dipecat dengan keputusan darurat tanpa proses hukum yang mengarah pada pelanggaran HAM terhadap ratusan ribu orang. Mereka juga ditahan tanpa proses pengadilan yang adil. Para pemimpin UE akan membahas apakah akan memasukkan pejabat Turki ke dalam daftar hitam atau menjatuhkan sanksi lain.

Mereka juga akan memberi sinyal jika proses akses Turki memiliki dampak jangka panjang, dalam pertemuan puncak yang disebut sebagai “momen penting” dalam hubungan UE-Turki oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell. Komisi tersebut juga mengomentari masalah HAM setelah hakim pro-Erdogan membenarkan 337 orang seumur hidup dalam satu hari pekan lalu. Sebagian besar dari mereka adalah perwira muda Angkatan Udara yang dituduh terlibat dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016.

Para diplomat Uni Eropa tidak memantau secara langsung persidangan tersebut, tetapi mereka meyakini bahwa tidak ada independensi yudisial di Turki. Komisi Eropa telah memiliki data jumlah orang yang terlibat dalam tindakan keras pascakudeta. “Pada Juni 2020, total 19.583 perwira militer diberhentikan dari dinas karena dugaan hubungan mereka dengan gerakan Gulen, sekitar 3.600 pada 2019 saja,” kata juru bicara komisi itu, merujuk pada Fethullah Gulen, seorang ulama Turki yang disalahkan oleh Erdogan.

Turki juga menahan puluhan ribu warga sipil. Tetapi dia menekankan bahwa perlu penghormatan terhadap HAM dan supremasi hukum “mewujudkan baik dasar hubungan (UE-Turki) dan aspirasi rakyat Turki dan Uni Eropa”.

Tindakan keras pascakudeta juga mendorong lonjakan aplikasi suaka Turki di UE. Dari awalnya hampir tidak ada sebelum 2016 menjadi antara 1.500 dan 2.500 orang dalam sebulan, termasuk 1.696 orang pada September tahun ini. ● tom

Covid-19 dan Perang Membuat 270 Juta Warga Dunia Terancam Kelaparan

ROMA(IM)- Tantangan masyarakat dunia di tengah pandemi Covid-19 kian berat. David Beasley, peraih Nobel Perdamaian yang juga Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan setidaknya ada 270 juta warga dunia kini terancam kelaparan. Selain karena Covid-19, kelaparan itu diakibatkan perang, perubahan iklim, dan penyalahgunaan krisis pangan sebagai senjata politik.

Jumlah warga yang terancam kelaparan ini meningkat sekitar 35 juta dari prediksi sebelumnya sebanyak 135 juta orang. “Kegagalan kita dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat akan lebih dahsyat dibandingkan Covid-19. Saat ini, setidaknya 270 warga dunia terancam kelaparan,” ujar Beasley, dikutip Euronews.

Tahun lalu, WFP menyalurkan bantuan pangan terhadap 97 juta warga di seluruh dunia. Atas aksi itu, WFP menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada 9 Oktober. Selain itu, WFP berupaya keras memutus penyalahgunaan krisis pangan sebagai senjata politik di wilayah konflik. Kepala Komite Nobel Berit Reiss-Andersen juga mengatakan sikap unilateral WFP diperlukan untuk mengatasi masalah dunia.

Beasley menambahkan, penerimaan penghargaan bergengsi itu bukan sekadar pengakuan, tapi desakan untuk melakukan upaya yang lebih maksimal. Permasalahan pangan juga tidak dapat diselesaikan sendirian. Faktanya, krisis pangan dapat menimbulkan kekacauan ke berbagai wilayah hingga terjadinya migrasi.

WFP menyatakan beberapa wilayah yang rentan terkena krisis pangan ialah Burkina Faso, Sudan Selatan, Nigeria, dan Yaman. Bahkan, jutaan warga Yaman mengalami malnutrisi akibat kurangnya aliran dana selama Covid-19. Akses menuju Yaman juga banyak mengalami tantangan karena ditutup negara tetangga.

Yaman kini sedang dilanda

perang sipil antara tentara pendukung Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi dan tentara mantan Presiden Ali Abdullah Saleh sejak 2015. Menurut PBB dan sumber lainnya, jumlah korban tewas mencapai 10.000 orang dari Maret 2015-November 2017, termasuk di dalamnya 5.200 warga sipil.

Sebelumnya, WFP menyatakan lebih dari 30 negara berkembang pernah mengalami musibah kelaparan, 10 di antaranya ekstrem. Kondisinya sangat memprihatinkan. Menurut Beasley, beberapa orang di wilayah itu bahkan tidak makan sehari-hari, menderita sakit, dan meninggal dunia akibat kurangnya nutrisi.

WFP khawatir krisis kelaparan akan semakin memburuk menyusul adanya wabah Covid-19. Meski tidak seburuk pasca Perang Dunia II, Covid-19 membuat ekonomi dunia mengalami resesi. Mereka mendesak agar negara kaya mendonasikan USD2 miliar, di mana USD350 juta digunakan untuk suplai makanan dan medis. “Saya kira 2020 akan menjadi tahun yang buruk sejak Perang Dunia II. Kita memprediksi krisis kelaparan bisa terjadi pada akhir tahun ini,” kata Beasley.

Di Sudan Selatan, sebanyak 61% penduduknya terdampak krisis pangan akibat perubahan iklim. Bahkan, sebelum wabah virus korona meluas, sebagian wilayah Afrika Timur dan Asia Selatan telah jatuh dalam jurang kelaparan yang amat parah. Penyebabnya, kekeringan dan wabah serangga yang menghabiskan persediaan. Ekonom senior WFP, Arif Husain, mengatakan, lockdown dan resesi ekonomi kian menghancurkan masyarakat.

Awal tahun ini, bantuan yang dikirimkan WFP ke sejumlah kawasan Yaman yang dikendalikan pemberontak Houthi berkurang. Lembaga PBB tersebut mengaku tidak menerima bantuan sebesar sebelumnya dari pihak pendonor akibat krisis kesehatan dan tingginya aksi serangan oleh kelompok separatis. ● gul

PM Lebanon Hassan Diab Jadi Terdakwa Ledakan Beirut

BEIRUT(IM) - Kantor berita resmi Lebanon melaporkan bahwa jaksa yang menyelidiki ledakan pelabuhan Beirut mengajukan dakwaan terhadap perdana menteri sementara dan tiga mantan menteri. Jaksa menuduh mereka telah lalai yang menyebabkan kematian ratusan orang.

Hakim Fadi Sawwan kemudian mengajukan dakwaan terhadap Hassan Diab dan mantan Menteri Keuangan Ali Hassan Khalil, serta Ghazi Zeiter dan Youssef Fenianos, keduanya adalah mantan menteri pekerjaan umum.

Keempatnya didakwa dengan kecerobohan dan kelalaian yang menyebabkan kematian dalam ledakan pada 4 Agustus di pelabuhan Beirut, yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai ribuan orang. Ledakan tersebut disebabkan oleh timbunan besar bahan peledak yang telah disimpan di pelabuhan selama bertahun-tahun, dengan sepengetahuan pejabat keamanan dan polisi yang tidak melakukan apa-apa.

Keempatnya adalah orang paling senior yang didakwa sejauh ini dalam penyelidikan, yang dilakukan secara rahasia. Kemarahan terkait peristiwa itu telah menumpuk karena investigasi yang lambat, kurangnya jawaban dan fakta bahwa tidak ada pejabat senior yang didakwa.

Dikutip dari Al Arabiyah, Kamis (10/12), sekitar 30 petugas keamanan Lebanon serta petugas pelabuhan dan bea cukai telah ditahan dalam penyelidikan sejauh ini.

Diab, yang menjadi perdana menteri akhir tahun lalu, mengundurkan diri beberapa hari setelah ledakan, yang meratakan pelabuhan utama negara itu dan menghancurkan sebagian besar kota. Mantan profesor di American University of Beirut itu terus menjalankan fungsinya dalam kapasitas sebagai pejabat sementara saat upaya untuk membentuk pemerintahan baru terhenti di tengah perselisihan politik.

Ledakan tersebut dianggap sebagai salah satu ledakan non-nuklir terbesar yang pernah tercatat. Zeiter menjabat menteri perhubungan dan pekerjaan umum pada 2014, disusul Fenianos pada 2016 yang menjabat hingga awal 2020. Sedangkan Khalil menjabat menteri keuangan pada 2014, 2016 dan hingga 2020.

Sejumlah dokumen segera muncul setelah ledakan yang menunjukkan bahwa setidaknya 10 kali selama

enam tahun terakhir, pihak berwenang dari bea cukai Lebanon, militer, badan keamanan dan peradilan memperingatkan bahwa persediaan besar bahan kimia yang berpotensi berbahaya disimpan dengan hampir tanpa perlindungan di pelabuhan di jantung kota Beirut.

Presiden Michel Aoun, yang menjabat sejak 2016, mengatakan bahwa dia pertama kali diberi tahu tentang persediaan hampir tiga minggu sebelum ledakan dan segera memerintahkan badan militer dan keamanan untuk melakukan “apa yang diperlukan”. Tetapi dia menyarankan tanggung jawabnya berakhir di sana, dengan mengatakan dia tidak memiliki otoritas atas pelabuhan dan pemerintah sebelumnya telah diberitahu tentang keberadaannya.

Sejak materi tersebut tiba di Lebanon pada akhir 2013, empat perdana menteri telah menjabat selama tujuh tahun terakhir. Najib Mikati, Tammam Salam dan Saad Hariri dikabarkan mengaku tidak mengetahui keberadaan material itu di pelabuhan. Diab mengatakan hanya diberitahu tentang keberadaan “bahan peledak” beberapa hari sebelumnya dan berencana mengunjungi situs tersebut. ● ans



PANDEMI COVID-19 DI MALAYSIA

Seorang dokter mengumpulkan sampel usab dari seorang pria untuk di tes penyakit virus korona (Covid-19) di luar Clinic Ajwa di Shah Alam, Malaysia, Kamis (10/12).

Pembawa Acara Televisi Afghanistan Tewas Ditembak

KABUL(IM)-Juru bicara pemerintah Afghanistan Attaullah Khogyan mengatakan orang tak dikenal menembak dan membunuh seorang pembawa acara televisi. Pelaku melepaskan tembakan ke Malala Malwand ketika perempuan itu baru keluar dari rumahnya yang terletak di timur Provinsi Nangarhar.

Pada Kamis (10/12) Al Arabiya melaporkan belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Tapi kelompok yang berafiliasi dengan ISIS bermarkas di timur Afghanistan mengklaim sebagai besar serangan terhadap warga sipil baru-baru ini.

Kelompok pemberontak

Taliban yang tengah menggelar perundingan dengan pemerintah Afghanistan di Qatar juga beroperasi di daerah tersebut. Walaupun sedang dalam proses negosiasi tapi Taliban masih melakukan serangan terutama pada pasukan keamanan Afghanistan.

Selain berprofesi sebagai pembawa acara televisi dan radio, Maiwand juga aktivis. Ia mengadvokasi hak perempuan dan anak-anak di Afghanistan. Bulan lalu dua orang jurnalis Afghanistan tewas dibunuh di dua pengeboman yang terpisah. Organisasi pers internasional Reporters Without Borders mengatakan Afghanistan salah satu negara paling mematikan bagi jurnalis. ● ans



UNJUK RASA AKTIVIS ARGENTINA

Aktivis berunjuk rasa sebagai dukungan melegalisasi aborsi, di depan gedung Kongres Nasional di Buenos Aires, Argentina, Kamis (10/12).

Ibu Lima Anak di India Diperkosa 17 Pria Secara Bergiliran

DUMKA(IM) - Seorang Ibu dari lima anak di India melapor ke polisi bahwa dirinya telah diperkosa oleh 17 pria secara bergiliran di distrik Dumka, negara bagian Jharkand.

Dalam laporannya hari Rabu lalu, perempuan 35 tahun itu mengaku diserang 17 pria pada Selasa malam. Menurutny, para pelaku terlebih dahulu menyandera suaminya di sebuah bangunan.

Korban kepada polisi mengatakan bahwa dia mengenal satu pelaku, sedangkan 16 pelaku lainnya tidak dia kenal. Dua pejabat polisi, Sudarshan Mandal dan Ambar Lakra, telah mendatangi kampung korban untuk mengusut kasus tersebut.

Kejahatan tersebut diduga terjadi di lingkungan hukum kantor polisi Mufassil pada Selasa malam ketika korban pulang pasar desa bersama suaminya.

Sesuai pernyataan perempuan itu, dia kembali dengan suaminya dari pasar desa pada Selasa malam ketika 17 orang mencelat dan menyandera suaminya sebelum melakukan kejahatan,” kata Mandal.

Mandal mengatakan tes kesehatan terhadap korban telah dilakukan pada Rabu dan polisi sedang menunggu laporannya.

“Perempuan itu mengatakan dia hanya bisa mengidentifikasi satu orang (pelaku). Kami telah menahan tersangka untuk diinterogasi. Jika dite-

kukan keterlibatannya dalam kejahatan tersebut, dia akan dikirim ke penjara,” kata Mandal, seperti dikutip Hindustan Times, Kamis (10/12).

Suami dari korban mengatakan bahwa dia telah pergi ke rumah ibunya untuk membantu panen padi sebulan yang lalu.

Menurut situs web polisi Jharkhand, rata-rata lima kasus pemerkosaan telah tercatat hingga Juli tahun ini di negara bagian India tersebut.

Analisis terhadap angka yang tersedia menunjukkan bahwa sebanyak 1.033 kasus pemerkosaan di India telah diajukan hingga akhir Juli tahun ini, lebih tinggi dari angka tahun 2019. Menurut data Biro Catatan Kejahatan Nasional (NCRB), sebanyak 1.416 kasus pemerkosaan telah didaftarkan pada tahun 2019, yang berarti rata-rata ada empat kasus setiap hari.

Partai oposisi di Jharkand, Partai Bharatiya Janata (BJP), menyalahkan pemerintah yang dipimpin Partai JMM atas meningkatnya kasus pemerkosaan di negara bagian itu.

Mantan menteri kesejahteraan sosial dan pemimpin senior BJP Louis Marandi mengatakan, “Situasi hukum dan ketertiban telah memburuk di negara bagian. Kasus pemerkosaan menjadi sering terjadi di distrik kesukuan. Suku tidak aman di bawah pemerintahan ini,” katanya. ● gul